BUNGA RAMPAI
PMII RAYON SYARIAH
UIN WALISONGO SEMARANG

PMII

BUNGA RAMPAI

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab :
Sahabat Khoirul Fajri Asyihab

Pimpinan Redaksi :
Sahabat Rusda Khoiruz

Redaktur :
Sahabat Aflah Muna
Sahabati Amilia Khofifah
Sahabat M. Farhan Ardi Wirahman
Sahabat Ikhwan Nouval
Sahabat Khoirul Fajri A.
Sahabati Linda F.H.
Sahabat Muhammad Mun'im
Sahabat M. Taufiqurrahman
Sahabati Majida Nuur
Sahabat Nur Rahman
Sahabat Rusda Khoiruz

Desain Cover & Layout Isi :
Sahabat Muh. Nur Hamdan

EDISI: 2021

Alamat Redaksi :
Jl. Bukit Beringin Barat Blok B No. 59 RT.04 RW.14, Wonosari, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah. 50189

Contact Us :
Fajri 0878 7829 6855

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmataullahi Wabarakatuh

Salam Pergerakan !!! Hidup Mahasiswa !!! Hidup Rakyat Indonesia !!!

Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat-Nya kita sampai saat ini diberikan nikmat Iman dan Islam. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Sang Revolusioner Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang yakni ad-din al-islam. Selaku ketua PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo, saya hendak mengucapkan beribu terimakasih kepada seluruh kader maupun pengurus PMII Rayon Syariah, yang telah menyempatkan waktunya untuk menulis Bunga Rampai di penghujung periode kepengurusan ke-39 ini.

Tentu kurang lebih waktu satu tahun ini bukan lah waktu yang sebentar Sahabat/i. Kita telah mengarungi dan menahkodai kepengurusan di PMII Rayon Syariah dengan penuh suka cita. Dan hadirnya Bunga Rampai ini, semoga kelak di masa depan dapat menjadi pengingat bahwa kita pernah berjuang bersama-sama menjalankan roda kepengurusan di PMII Rayon Syariah.

Akan tetapi, ada yang lebih penting daripada hal tersebut, Sahabat/i. Tahukah kalian apa itu? Itulah apa yang telah kita kerjakan selama satu periode kepengurusan kita ini. Sangat sayang jika kita kemudian pasca demisioner meninggalkan begitu saja apa yang pernah kita kerjakan bersama-sama, Sahabat/i. Untuk itu, Bunga Rampai yang kita susun bersama ini barangkali dapat menjadi pengingat kita agar selalu menetapi jalan perjuangan dan pergerakan.

Bukan berarti pasca demisioner nanti pekerjaan rumah kita usai begitu saja, Sahabat/i. Tidak sama sekali. Salah satu isu yang masih dapat dan sangat mungkin kita perjuangkan ke depan ialah isu pendidikan. Sebagaimana yang kita tulis dalam buku Bunga Rampai ini. Bahkan suatu bangsa mustahil berubah tanpa adanya kebebasan dalam belajar, pendidikan yang membebaskan, seperti kata Paulo Friere. Kita masih punya tugas untuk terus mengawal isu ini, Sahabat/i.

Tidak bisa tidak, ketika kita hendak memperbaiki atau menciptakan pendidikan alternatif kita bakal terjun di dunia aktivisme kembali. Maka dari itu setelah purna dari kepengurusan rayon bukan berarti pekerjaan rumah kita telah usai. Perlu diketahui, bahwa wajah pendidikan kita dari tahun ke tahun semakin menampakkan wajah komersilnya, Sahabat/i. Bisa kita lihat dari biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang makin tak terjangkau, hingga defisit ilmu surplus gelar kita temuhi berceceran di mana-mana.

Banyak mahasiswa sekarang berangkat kuliah dengan hitungan matematis dengan harapan kelak ketika sudah lulus mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebatas layak, tapi tidak pernah menelisik buat siapa dia bekerja. Buat sistem yang menindas kah? Atau cuman buat perut belaka? Akhirnya mindset semacam ini apabila tertanam masuk ke alam bawah sadar para mahasiswa hari ini, bukan tidak mungkin lima belas sampai dua puluh tahun ke depan pendidikan bakal kehilangan esensinya. Tanpa isi. Bakal benar-benar gersang, mungkin. Padahal bukan itu sejatinya tujuan diadakannya pendidikan. Melainkan sebagaimana kata Tan Malaka, pendidikan diadakan dalam rangka kita semua menjadi manusia seutuhnya. Bukan malah menjadi skrup-skrup korporat secara kaffah.

Khoirul Fajri A.

Daftar Isi

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Plagiasi: Penghambat Kemajuan Bangsa

Oleh: Aflah Muna

Praktek plagiasi di dalam dunia perkuliahan (akademisi) seringkali masih terjadi. Maraknya plagiasi di lakangan akademisi memberikan dampak yang serius, yaitu berkurangnya integritas akademik, tidak adanya hasil ide atau gagasan baru dan juga merugikan orang lain yang tidak melakukan tindakan plagiasi.

Perkembangan tekhnologi saat ini telah sangat maju, tak terkecuali masuk ke bidang pendidikan. Kemajuan tekhnologi informasi tersebut mempunyai pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positifnya adalah dengan mudahnya kita mengakses sember ilmu pengetahuan dari web ataupun jurnal untuk menambah wawasan dan juga bisa sebagai referensi untuk membuat suatu karya ilmiah. Pengaruh negatifnya yaitu dengan kemudahan itu semua, orang-orang menjadi malas untuk berfikir dan berfikir secara instan dengan "*meng-copas*" karya orang lain dan dipakai atas nama diri sendiri.

Marshal dan Rowland (1998) menyatakan bahwa dalam niatnya, plagiasi dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah plagiasi sengaja (*deliberate*) dan plagiasi tidak sengaja (*accidental*). *Deliberate* adalah menjiplak atau meniru karya orang lain secara keseluruhan atau membajak isi buku dengan sengaja tanpa meminta izin dari penulis karya atau buku tersebut. Sedangkan *accidental* lebih kepada kurangnya pengetahuan dari penulis terhadap kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tidak mengetahui etika-etika untuk menulis suatu karya ilmiah. Hal ini yang sering terjadi dan tidak disadari oleh banyak akademisi di dunia pendidikan.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan "*Plagiat adalah perbuatan disengaja atau pun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip atau sebagian atau seluruh karya/karya ilmiah pihak lain dan diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadahi*"

Di Indonesia sendiri marak terjadi praktek plagiasi karya ilmiah. Seorang oknum Guru Besar di salah satu Perguruan Tinggi ternama di Semarang dan juga memiliki jabatan yang tinggi pun bahkan diduga melakukan praktek plagiasi dalam desertasinya di tahun 2003 dengan menjiplak skripsi mahasiswanya pada tahun 2001 yang

Sumber : https://bintangpustaka.com

kebetulan oknum tersebut menjadi dosen pembimbingnya dahulu. Kasus ini pun masih diproses hingga sekarang.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan plagiasi karya ilmiah, diantaranya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membuat suatu karya, karena waktunya tidak digunakan sebaik mungkin. Kemudian karena ber-mindset bahwa si pembaca tidak mengetahui bahwa karyanya itu adalah hasil platiasi dan yang terakhir adalah bahwa berpandangan instan untuk cepat mendapatkan nilai atau tujuan tertentu.

Dalam dunia pendidikan, plagiarisme terkait erat dengan civitas akademika. Ketajaman berfikir seorang akademisi secara bertahap diasah untuk menajdi lulusan yang jujur, mandiri, bermoral tinggi dan percaya diri karena diproses dengan pembelajaran yang bersih dan bermutu. Dengan begitu ada beberapa cara untuk meminilamisir praktek plagiasi diantaranya dengan memberi pemahaman/ kesadaran terkait kaidah-kaidah dan etika penulisan plagiasi sejak dini. Melakukan parafrasa (memaknai dengan arti sendiri) atau dengan melakukan interpretasi (memberikan pendapat terhadap pendapat orang lain) dan juga memumbuhkan rasa menghargai karya orang lain.

Plagiarisme dapat menyebabkan SDM suatu bangsa menjadi pemalas untuk berfikir, tidak menciptakan pembaharuan, tidak menghargai karya orisinil orang lain dan melumpuhkan daya saing antar bangsa. Keaslian karya ilmiah kaum intelektual menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa karena dapat memunculkan pikiran atau ide-ide yang dapat mengubah posisi suatu bangsa itu sendiri menjadi lebih baik. Bukan hanya sebagai batu loncatan untuk mendapat nilai atau gelar tertentu.

Lemahnya Pendidikan di Masa Pandemi

Oleh: Amilia khofifah

Pendidikan merupakan pondasi awal yang dibutuhkan manusia dalam mengasah pengetahuan untuk lebih baik di kehidupan mendatang. Di Indonesia sendiri Pendidikan telah mengalami berbagai perkembangan sistem dan kurikulum, sistem yang dipakai di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan nasional yang berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan. Tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk memberikan pengetahuan di bidang akademis, seni atau ketrampilan, perilaku serta diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan. Demi mewujudkan cita-cita Indonesia dalam menjalankan sistem pendidikan yang baik sangat diperlukan dukungan dan kerja keras dari kita semua sebagai putra putri bangsa.

Belum lama ini Indonesia kita tercinta digemparkan dengan pandemic covid-19 yang mengharuskan semua orang membatasi segala bentuk aktivitas mereka di luar rumah, yang mana orang-orang harus bekerja dari rumah, ditambah lagi pada pertengahan

maret 2020 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk belajar dari rumah atau biasa disebut dengan sistem daring yang mana siswa dan mahasiswa hanya bisa belajar melalui online yang tentunya sangat tidak efektif. Peraturan untuk belajar dari rumah yang dikeluarkan pemerintah tentunya menjadi mimpi buruk bagi tenaga pelajar maupun siswa dan mahasiswa mengingat manusia merupakan mahluk sosial yang selalu berinteraksi secara langsung dengan manusia lainnya. Tentunya kegiatan belajar mengajar tidak akan efektif jika tidak bertatap muka secara langsung.

Permasalahan dari sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal, guru dan dosen yang terkadang hanya memberikan tugas saja tanpa memahamkan, siswa dan mahasiswa akhirnya malas. Kebanyakan hanya mementingkan absen saja ketimbang belajar dengan serius membuat pembelajaran kurang efektif ditambah lagi siswa dan mahasiswa harus membayar penuh biaya pendidikan tanpa mendapat keringanan dan fasilitas apapun. Seolah-olah pembelajaran secara online ini sama dengan pembodohan, belajar hanya formalitas dengan dalih pandemi. Mahasiswa tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh fasilitas yang semestinya seperti fasilitas untuk belajar dengan nyaman, pembelajaran yang efektif serta jaringan internet yang memadai.

Akhir-akhir ini pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang menurut saya lucu yaitu PPKM (Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Sekolah-sekolah dan kampus ditutup sedangkan pusat perbelanjaan dan wisata dibuka selebar-lebarnya bahkan untuk wisatawan asing bebas keluar masuk Indonesia. Lagi-lagi alibi untuk memutus rantai penyebaran covid 19 digunakan yang jelas-jelas tidak ada pengaruhnya sama sekali bahkan masalah baru timbul

akibat kebijakan tersebut yaitu meningkatnya jumlah kemiskinan. Rakyat kecil sudah sakit karena pandemi covid-19, ditambah lagi banyak pekerja dan buruh yang di-PHK, pengusaha kecil mengalami kerugian dan kesusahan hidup lainnya tapi masih dibebani dengan peraturan-peraturan tanpa solusi seperti pedagang dilarang berjualan lebih dari jam 8 malam. Akibat dari kerugian-kerugian selama pandemi ini banyak mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah kesusahan untuk membayar uang kuliah dan terpaksa harus putus kuliah karena sudah beruhasa meminta keringanan namun tak pernah didengar oleh pejabat kampus maupun pemerintah.

Jika sudah seperti ini mereka-mereka yang berkuasa di atas sana seolah-olah menyalahkan rakyat kecil dengan bangga dan lantang mengucap " jika tak punya uang ya gak usah kuliah!". Miris dan tak patut seharusnya dikatan oleh orang berpendidikan tinggi. Kata tersebut membuat saya berfikir bahwa hari ini hak untuk memperoleh pendidikan yang layak hanya boleh untuk orang-orang beruang dan berkuasa.

Krisisnya moral dan kemanusiaan di negeri ini membuat sirnanya nilai-nilai kemanusiaan, yang mana status sosial, dan kekuasaan menjadi lebih penting dari segalanya. Sama halnya dengan kampus dan sekolah-sekolah saat ini yang hanya mementingkan eksistensinya saja tanpa benar-benar memikirkan intelektual dan moral putra-putri bangsa yang nantinya juga akan menjadi penerus generasi bangsa. Jika kebijakan pendidikan di negeri ini tetap seperti ini, beberapa tahun ke depan mungkin Indonesia akan krisis orang-orang berintelektual tinggi, jujur, dan bermoral.

PMII Rayon Syariah dan Pendidikan Alternatif Semasa Pandemi

Oleh: M Farhan Ardi Wirahman

Organisasi secara umum dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang dikoordinir secara kesadaran sebagai suatu tempat atau wadah bagi seseorang untuk berkumpul, bekerjasama, secara sistematis, terencana, terkendali dan terpimpin dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi ekstra kemahasiswaan yang berdiri sejak 17 April 1960 merupakan wadah bagi mahasiswa yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah atau selaras dengan pemahaman keagaman Nahdlatul Ulama. Sebagai bagian dari pergerakan mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU), PMII merupakan salah satu pilar pergerakan Islam di Indonesia. PMII diperlukan sebagai bagian dari gerakan muda Islam Indonesia dengan karakter yang dimilikinya. Pola karakter tersebut di antaranya, pola Islam Indonesia yang nasionalis sehingga PMII sebagai garda terdepan pembela keutuhan NKRI, pola keislaman

yang toleran yang menghargai keberagaman, pola keislaman yang kultural antara budaya Islam dengan budaya nasional.

Pendidikan alternatif secara sederhana dapat dilihat sebagai sistem pendidikan yang tidak identik dengan pendididikan atau sekolah secara formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjan. Kata alternatif dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah pilihan yang merupakan keharusan. Jadi pendidikan alternatif bisa dikatakan usaha atau proses pengubahan sikap dan tata laku yang menjadikan keharusan bagi seseorang atau sekelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Sehingga istilah pendidikan alternatif merupakan istilah generic yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional.

Secara umum berbagai bentuk pendidikan alternatif itu mempunyai tiga kesamaan, yaitu pendekatannya yang lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik, orang tua/keluarga, dan pendidik, serta yang dikembangkan berdassarkan minta dan pengalaman. Dalam konteks keorganisasian pendidikan alternatif dapat diartikan sebagai pendidikan progresif.

Saat ini di Indonesia sedang mengalami krisis terutama dalam hal pendidikan karena di Indonesia hari ini sedang terdampak wabah virus covid 19 yang memang meluluhkantahkan segala aspek kehidupan sosial yang ada pada masyarakat secara umum namun dalam konteks ini dunia pendidikan juga mengalami fase dimana sistem pendidikan di Indonesia mulai meratapi wajah barunya.

Mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2020 Tentang “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat

Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)", Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut di antaranya adalah penghapusan Ujian Nasional; perubahan sistem Ujian Sekolah; perubahan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan penetapan belajar dari rumah (pembelajaran daring).

Pada mulanya kebijakan ini dirasa tepat di masa awal pandemi. Wali murid dan pegiat pendidikan menilai bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi para siswa atau mahasiswa dari paparan COVID-19. Namun, kegelisahan mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Tenaga pendidik mulai resah karena memang ini situasi yang dari awal belum pernah ada dan tidak ada contoh konsep pendidikan secara daring. Siswa atau mahasiswa secara umum pun juga sedikit mengalami keluhan bahwa pendidikan daring dirasa secara substansi tidak didapat dan juga ditambah beban kuota internet yang membengkak karena harus dipaksa melakukan pendidikan dengan menggunakan koneksi internet.

PMII sebagai organisasi dengan basis kaderisasi hari ini melihat pedidikan di masa pandemi sangat memprihatinkan karena mahasiswa secara umum dipaksa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus dilakukan secara daring (dalam jaringan) dimana secara subtansif keilmuan jauh dari kata efektif, jangankan maksimal mencapai taraf optimal pun itu sudah sangat baik.

Pada awal pemberlakuan kebijakan pendidikan secara daring, PMII khususnya Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang berusaha beradaptasi dengan keadaan yang memang memaksa kader-kader PMII Rayon Syariah untuk berusaha melakukan inovasi baru

mengenai konsep dan sistem kaderisasi. Sejak awal MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru) terus berlanjut pada kaderisasi formal PKD (Pelatihan Kader Dasar) memang diadakan secara offline karena memang harus disadari bahwa kader-kader yang ikut dalam proses kaderisasi formal PMII Rayon Syariah, semuanya sudah merasakan perkuliahan secara daring, maka dari itu PMII Rayon Syariah sadar bahwa substansi memang harus diraih dan didapatkan dengan cara melakukan kegiatan kaderisasi secara offline walaupun dengan keadaan yang serba kekurangan.

PMII Rayon Syariah sebagai organisasi kemahasiswaan memang harus mampu untuk kemudian menjadi organisasi gerakan mahasiswa sebagai pendidikan alternatif di masa pandemi kali ini. Dengan adanya diskusi, sekolah-sekolah yang diadakan oleh PMII Rayon Syariah memang bertujuan supaya bagaimana caranya kader-kader PMII Rayon Syariah mampu mendapatkan pemahaman-pemahaman yang selama ini kurang didapatkan dalam ranah perkuliahan daring. Sekolah-sekolah yang diadakan oleh biro dan lembaga seperti Sekolah Nalar Hukum, Sekolah Kewirausahaan, Sekolah Advokasi, Sekolah Politik, Kelas Islamic Studies, Kelas Kepenulisan dan juga diskusi-diskusi yang dibuat oleh PMII Rayon Syariah memang harapannya untuk memberikan pendidikan ataupun pemahaman yang kurang selama perkuliahan secara daring.

Ketidakberdayaan Hukum di Hadapan Kaum Kapitalis: Sebuah Kritik Marxis atas Kebekuan Madzhab Positivis

Oleh: Ikhwan Nouval

Tulisan ini akan membahas mengenai pemikiran marxis tentang hukum, dimana akan membuka pemikiran yang lebih luas lagi mengenai hukum dan keadaanya. Dewasa ini memang kita ketahui bahwasanya positivisme telah mengakar kuat dalam tubuh hukum itu sendiri. Hukum yang dikonstruksikan bebas nilai, dimana hukum terlepas dengan moral, etika, sosial, ekonomi, maupun politik. Hal tersebutlah yang menjadi sudut pandang para kaum *legal positivism*.

Karl Max adalah seorang pemikir, filsuf, sekaligus aktivis di bidang ekonomi maupun politik. Karl Max sendiri tidak pernah menghasilkan karya tentang teori hukum. Namun pandangan hukum ini lahir oleh kaum Marxis (pengikut teori marx). Dimana pandangan tersebut lahir dari keresahan bahwasanya hukum sudah tidak lagi pada jalurnya dan kaum kapitalis menggunakan hukum untuk kepentingannya yang tidak memperdulikan kaum proletar. Secara dasar yang mendalam bahwa hukum ada untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang sebenarnya. Pandangan tersebut

nantinya akan menjadi pisau analisis dalam memehamai fenomena ketidakberdayaan hukum dewasa ini dalam memberikan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Banyak tokoh pemikir hukum yang mengkritik sudut pandang *legal positivism*, seperti Satjipto Rahardjo dalam gagasan Hukum Progresif, Roberto Unger dan Duncan Kennedy dalam *Critical Legal Studies,* O.W Holmes dan J. Frank dalam *legal realism*. Yang pada intinya kritik tersebut dilontarkan bahwasanya hukum tidak bisa terpisah dengan faktor-faktor yang ada di masyarakat seperti, etika, moral, ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Faktor yang ada di masyarakat tersebutlah yang seharusnya menjadi pendukung dalam proses berhukum agar dapat mencapa tujuan keadilan yang sebenarnya.

Adanya kontra produktif dalam bekerjanya hukum, dimana hukum yang membawa panji-panji keteraturan dan ketertiban telah gagal dalam mewujudkannya dan bahkan kenyataanya hukum telah menimbulkan suasana yang sebaliknya. Positivism semata-mata telah menjadikan hukum sebagai proses peraturan saja dan melihatkan hukum sebagai bentuk formalnya saja.

Proses hukum dewasa ini (termasuk di Indonesia) dalam menjawab kebutuhan, problem yang ada di tataran masyarakat, maupun kemacetan hukum dalam menjawab keadilan hanyalah dengan membuat peraturan baru, sehingga menyebabkan banjirnya peraturan. Dalam pembentukannya pun pemerintah ataupun Lembaga legislator tidak melihat apakah peraturan tersebut efisien atau tidak. Maka dari itu perlu adanya perubahan sudut pandang dalam proses berhukum yang melibatkan interaksi antar faktor-faktor yang ada di masyarakat.

Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik, namun sebagai fungsi ekonomi. Jika hukum berada di tangan kapitalis atau kaum borjuis, maka akan digunakan untuk melanggengkan tujuannya sehingga hukum berfungsi tidak untuk melindungi secara menyeluruh tetapi hukum akan melindungi kelompok yang dominan.

Menurut Antonio Gramsci, dimana ideologi yang dominan selalu berusaha untuk mempererat formasi sosial yang di dalamnya ada kelas sosial dimana agar masyarakat tunduk terhadap kepemimpinan dominan. Pada hal ini hukum akan muncul dari ideologi yang dominan yang kemudian ditransformasikan ke dalam aturan sehingga hukum akan membawa ideologi kelompok dominan tanpa melihat kelompok yang tidak dominan.

Sumber : https://bintangpustaka.com

Jika hal itu terjadi maka hukum bukan merupakan alat integrasi melainkan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Sejatinya dalam sosiologi hukum, Marx menjelaskan bahwa sejatinya hukum diciptakan bukan untuk keadilan, tetapi sebagai alat pemicu konflik antara kaum borjuis dan proletar. Sehingga hukum ada hanya untuk menghancurkan

Pemikiran marxis tentang hukum yang terjadi pada masanya terdapat pada konsep *base-suprastructur* yang mendeskripsikan masyarakat ke dalam 2 bagian, yaitu struktur dasar (faktor ekonomi) dan struktur atas (hukum, sosial, politik, agama, seni, ilmu pengetahuan lainnya). Pendekatan konsep *base-suprastructur* meletakan hukum pada struktur atas yang di mana harus merefleksikan struktur dasarnya, yaitu faktor ekonomi. Konsep ini mengakar pada teori *materialisme historis*, dimana semua gerakan politik, sosial, intelektual, dan etis dalam sejarah dideterminasi oleh cara dengan apa masyarakat mengorganisir Lembaga sosial dalam melaksanakan aktivitas produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumsi barang.

Dalam hal ini yang menjadi penentu hanyalah faktor ekonomi saja sebagai struktur dasar, sehingga faktor lain yang berada di struktur atas sama sekali tidak memiliki daya pengaruh. Hal ini sangatlah kaku, untuk membuat konsep tersebut tidak kaku maka perlu pendekatan determinan lunak, dimana struktur yang ada saling mempengaruhi satu sama lain. Jika hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, maka segala faktor yang ada di masyarakat saling berinteraksi dalam membentuk hukum, termasuk faktor ekonomi.

Evegny Pashukanis dalam bukunya *"The General Theory Law and Marxism"*, mengatakan "mengapa aturan kelas tidak tetap seperti apa adanya, penaklukan faktual dari satu bagian populasi oleh bagian lain? Mengapa ia mengambil bentuk pemerintahan resmi negara, atau yang merupakan hal yang sama, mengapa mesin pemaksaan negara tidak muncul sebagai mesin pribadi kelas penguasa, mengapa ia melepaskan diri dari kelas penguasa dan mengambil bentuk *aparatus impersonal* dari kekuatan publik, terpisah dari masyarakat? Hal lain yang dicela Kamerad Stuchka, yaitu bahwa saya mengakui keberadaan hukum hanya dalam masyarakat borjuis, saya mengabulkan…" (E. B. Pashukanis, Teori Umum Hukum dan Marxisme, 1924).

Pada pembahasan di atas terlihat bagaimana keberagaman pendekatan dalam membahas hakikat hukum dengan ciri khas dimana faktor politik dan ekonomi sebagai faktor pendekatan pada hukum. Melihat hal itu, dapat kita cerminkan di Indonesia dimana kaum borjuis selalu menang terhadap kaum miskin dalam proses berhukum. Bahkan dalam pembuatan aturannya sudah melibatkan bagaimana hukum memihak kaum kapitalis dalam melancarkan tujuannya tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. Hukum ada untuk ketertiban dan kesejahteraan bukan sebaliknya. Namun sekarang terlihat bagaimana romantisnya kapitalisme dengan hukum.

Pramoedya Bukan Hanya Sekedar Sastrawan, Melainkan Juga Ahli Historiografi Indonesia

Oleh: Khoirul Fajri A

Selama ini barangkali kita hanya mengenal Pramoedya sebagai seorang sastrawan cum novelis kondang dengan masterpiece karyanya yaitu Tetralogi Pulau Buru. Dalam sebuah diskusi sastra yang digelar di Jakarta sekira beberapa tahun yang lalu, ada seorang penulis yang menyebut Tetralogi Pulau Buru sebagai mahakarya yang jauh melampaui pencapaian Pramoedya sebelum 1965, apalagi jika dibandingkan dengan tulisan-tulisannya yang lebihi mirip pamphlet menjelang peristiwa 1965. Sementara itu ada pula yang beranggapan bahwa karya-karya Pramoedya semenjak periode 1950, yang mana sebelum dia bergabung bersama LEKRA dan kemudian menjadi seorang intelektual kiri yang masyhur, lebih baik kualitasnya disbanding karya-karyanya yang belakangan. Sehingga dalam arus kebudayaan dan intelektual Indonesia setidaknya ada dua Pramoedya: sastrawan terkemuka dengan berderet-deret karya dan seorang *pamphleteer* yang mengenyahkan lawan bicaranya dengan pena yang tajam. Dan kedua Pramoedya itu bukan seorang ahli sejarah.

Padahal dalam karya-karyanya sebelum yang ditulis antara 1956-65 terlihat betapa Pramoedya menaruh minat yang begitu besar terhadap sejarah sekalipun obsesi akan objektifitas yang terungkap dalam konsep *ilmu sejarah* menurut *historical estabhlisment* saat itu adalah penulisan tentang masa lalu yang objektif, yang notabene bersih dari kepentinagn politik dan ditulis dengan kaidah ilmiah yang ketat. Dan Pramoedya tidak sedikit pun memiliki itu semua. Sejarah yang ditulisnya penuh warna dan gairah, begitu subjektif, serta bernuansa politik dan tidak terlalu peduli pada apa itu yang dinamakan kaidah ilmiah.

Dengan demikian tidak begitu mengagetkan jika pada akhirnya *ilmu sejarah* yang menghendaki pemisahan antara sastra, politik, dan sejarah itu sendiri menjadikan terjadinya involusi dalam studi sejarah di Indoensia kemudian. Sebenarnya, menurut Hilmar Farid dalam salah satu tulisannya tentang *Pramoedya dan Historigrasi Indonesia* mengatakan bahwa rangkaian tulisan dan pemikiran Pramoedya mengenai beragam bentuk aspek sejarah Indoensia yang disusun antara tahun 1956-65 dan karya Pulau Buru, merupakan fragmen penting dalam upaya dekolonisasi pemikiran dan penulisan sejarah Indonesia.

Pramoedya mulai melakukan studi secara sistematis sejak pertengahan 1950, sedangkan tulisan-tulisannya yang berkenaan dengan sejarah mulai dilakukan dan disebarkan setelah dia keluar dari balik jejruji besi awal 1962-65. Perjalanan Pramoedya sebagai penulis sendiri dimulai dengan menulis beberapa puisi dan cerita pendek yang tidak begitu gemilang yang diterbitkan pada awaal 1947 di majalah terbitan Jakarta macam *Minggoe Merdeka, Sadar,* dan *Pantja Raja.*

Pramoedya juga sempat ditangkap oleh tentara Belanda dan disekap selama dua tahun di Bukit Duri, dan sekeluarnya dari sana pertengahan Desember 1949 ia kemudian mulai mengubah orientasi tulisannya ke arah yang lebih realis serta aktif dalam lingkaran Gelanggang, satu kelompok seniman dan intelektual yang begitu berpengaruh dalam sebagai kritikus sastra Indonesia hingga paruh kedua tahun 1950. Tulisan-tulisan Pramoedya pada zaman ini mirip tulisan para penulis sezamannya yang merupakan potret dari kehidupan rakyat Indonesia pasca perang yang jamak berisi tentang kritik sosial sekaligus bentuk ekspresi atas revolusi dan patriotisme yang seringkali malah tergelincir pada kesewenang-wenangan.

Titik balik perkembangan pemikiran Pramoedya ini setidaknya dapat dilacak selepas terjadi perdebatan dengan HB Jassin dan penulis lain yang dimuat dalam jurnal *Pudjangga Baru* yang memuat bahasan tentang bentuk serta isi dalam kesusastraan. Ia menilai bahwa perdebatan sastra tersebut terlalu sibuk mengenai bentuk sehingga tidak peduli lagi dengan isi dan arah kesusastraan. Humanisme universal yang digencarkan dalam *Surat Kepercayaan Gelanggang* pada hakikatnya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan sosial yang kian banyak. Hal ini lantas membuat persoalan yang sebenarnya tertutupi oleh diskusi kritik sastra yang melulu terarah dan monoton.

Tulisan semi-otobiografisnya yang berjudul “Sunyisenjap disiang hidup” (*Indonesia,* Juni 1956) yang merekam kegundahan dirinya sekaligus menjadi penanda bahwa Pramoedya mengakhiri perjalanannya sebagai penulis cerita pendek, yang selanjutnya di bawah pengaruh AS Dharta, Rivai Apin, Dodong Djiwapradja serta intelektual kiri yang lain yang terhimpun dalam LEKRA. Praktis,

pertemuan Pramoedya dengan kelompok ini membuat dirinya merasa terlahir kembali "sebagai bayi yang baru dilahirkan kembali (dan) mulai belajar kembali meninggalkan Rahim ibu, menyesuaikan diri dengan terang matahari" (Pramoedya Ananta Toer 1995: 154).

Pramoedya semakin tertarik pada sejarah serta meluangkan banyak sekali waktunya buat membaca dan mengumpulkan bahan terkait tokoh dan kejadian yang menarik minatnya. Tercatat awal Januari 1959 Pramoedya masuk LEKRA dan ditempatkan untuk memimpin Lembaga Sastra Indonesia (LESTRA). Dalam sambutannya ketika konferensi lembaga itu digelar, ia memperlihatkan arah baru dalam pemikirannya, yang memberi penekanan pada aspek pentingnya orientasi politik dan komitmen sosial dalam kebudayaan.

Pramoedya mulai menulis karyanya non-fiksi pada tahun-tahun ini dan selepasnya. Hingga *Hoakiau di Indonesia* yang merupakan karya non-fiksi pertamanya terbit pada tahun 1960 yang mana substansi isi buku tersebut menggugat politik anti-Tionghoa yang digelontorkan oleh pemerintah bersama militer semenjak tahun 1956, dan pada titik didihnya terjadi pengusiran ribuan orang Tionghoa selama 1959-60. Berkat tulisannya tersebut Pramoedya ditangkap dan dijebloskan kembali ke penjara tanpa pengadilan selama hampir satu tahun. Dan buku itu bernasib sial, dilarang keras oleh penguasa dan militer.

Setelah keluar dari jeruji besi pada awal 1961 Pramoedya makin gencar meneliti sejarah. Fokus perhatiannya yang pertama-tama ialah perkembangan gerakan nasionalis antara 1898 serta 1918, yang difokuskan pada tokoh dan organisasi. Lalu hasil dari penelitian tersebut diterbitkan sebagai seri artikel di lembar kebudayaan *Bintang Timur* mulai 1962. Lebih jauh dari itu, Pramoedya,

sebagaimana penulis sekurunnya hendak membonkar habis-habisan dan mengkritik historiografi kolonial. Para penulis pada waktu ini mulai menggugat apa yang mereka anggap bermasalah dalam historografi kolonial, yang mana faktanya selama ini sejarah dilihat dari kacamata orang Belanda sementara orang bumi putra sebatas jadi pelengkap, daripada sekedar sibuk membolak-balikkan sebutan "pemberontak" dalam historiografi kolonial menjadi "pahlawan".

Pramoedya bertolak dari kritik historiografi kolonial, yang lantas beranggapan bahwa tugas terpenting dan mendesak yang harus segera dilakukan adalah "melepaskan sedjarah dari ragka jang selama itu ditentukan oleh politik pengadjaran pendjadjah" (Pramoedya Ananta Toer 1962: IX).

Pramoedya antara lain memberikan kritik terhadap historiografi kolonial tidak hanya pada bagian perspektif sejarawan kolonial yang dianggapnya bermasalah, tapi juga sebab perbuatan mereka dalam "membersihkan" sejarah dengan cara memusnahkan arsip, mengenyahkan karya dan orang tertentu dari catatan sejarah, membuang orang dengan sengaja supaya hilang dari ingatan masyarakat seperti yang dilakukan oelh Rinkes yang membuang Tirto Adhi Soerjo atau memfilter sumber seperti yang dilakukan oleh Abendanon atas surat-surat Kartini.

Tidak sebatas mandek dalam kritik saja, Pramoedya juga bekerja keras yang dalam kurun waktu empat tahun (1961-65) mampu menghimpun tidak kurang dari 5.000 judul buku, membuat dokumentasi berbentuk guntingan surat kabar dan majalah lama dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sejarah. Seperti yang telah saya singgung di muka, Pramoedya mulai menerbitkan karyanya dalam lembaran *Lentera*. Penerbitan ulang *Hikajat Siti*

Mariah karya H. Mukti menjadi sumbangan penting studi sejarah selama periode Tanam Paksa. Dalam studinya tentang Semaoen ia juga menemukan kembali *Hikajat Kadiroen* yang sebelumnya tidak pernah dikenal apalagi dibicarakan.

Sumbangsih terpenting lain Pramoedya dalam kancah sejarah Indonesia yang digalinya adalah peran perempuan dalam gelanggang sejarah Indonesia. Sepertinya fokusnya pada perempuan ini bukan berkat pertemuannya dengan pikiran maupun teori feminis, melainkan datang dari petemuannya dengan bahan-bahan sejarah yang dihimpunnya.

Kerja kerasnya untuk membongkar historiografi kolonial yang kelewat mengandung bias ini dengan menggali sumber-sumber sejarah otentik membuahkan berjejer-jejer konsekuensi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua yang telah ditemukan olehnya termasuk gagasan tentang nasion yang mana menjadi tema sentral dalam kebangkitan dan kesatuan yang coba dijalankan

Sumber : https://bintangpustaka.com

semasa pemerintahan Soekarno, segera dihancurkan bersama pembantaian massal atas PKI pada September 1965. Padahal menjelang peristiwa 1965 ia telah mempersiapkan banyak sekali naskah yang akan diterbitkan mengenai historiografi Indonesia. Praktis, selepas peristiwa 65 itu Pramoedya bersama inteletual kiri lainnya dibungkam bahkan dibuang ke Digoel. Tapi bagaimanapun juga, pemerintah tidak bisa menghapuskan imajinasi radikal mereka tentang bagaimana sebuah nasion harus ditata.

Dengan demikian kita dapat membaca bahwa empat jilid karya Pulau Buru yang ditulisnya selama dalam masa pembuangan yang notabene di bawah tekanan kerja paksa sekaligus ketidakpastian nasib serta kenihilan sumber serta fasilitas menulis merupakan usaha Pramoedya untuk menuliskan kembali sejarah gerakan nasioanlis dalam bentuk karya fiksi. Bentuk novel ini dipilih Pramoedya sebab ketiadaan bahan-bahan sejarah dan sebab takut dituding memalsukan sejarah jika memaksa menulis karya non-fiksi yang sarat akan sumber rujukan. Oleh karenanya, keempat novel itu bukan bentuk ideal yang diharapkan oleh Pramoedya dalam menyusun historiografi Indonesia selama kurun wajtu 1956-65.

Pendidikan dan Etika sosial

Oleh: Linda F.H

Globalisasi memiliki dampak positif maupun negatif. Era globalisasi telah mensyaratkan kekuatan SDM yang tangguh dan mumpuni untuk berpartisipasi. Dibutuhkan usaha-usaha konseptual serta teknis yang perlu dikerjakan oleh para pemikir muslim. Konsep dan teknis yang diperlukan dalam menghadapi hal ini meliputi banyak aspek seperti strategi perencanaan pendidikan, beserta lembaganya, sampai pada pelatihan-pelatihan yang berjangka sebagai suatu sarana dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas, siap menghadapi era globalisasi, di semua jajaran dan tingkatan masyarakat.

Era globalisasi sendiri mengakibatkan terjadinya pertemuan dan gesekan anatara nilai-nilai budaya dan agama di dunia ini, memanfaatkan jasa dari komunikasi, transformasi dan informasi dari hasil modernisasi di bidang teknologi. Pertemuan serta gesekan ini tentunya akan menghasilkan suatu kompetisi liar di mana saling mempengaruhi, saling bertabrakannya nilai-nilai, atau

bahkan saling bekerja sama yang nantinya akan menghasilkan suatu sintesa dan antitesa baru. Untuk itu perlu kiranya peningkatan SDM melalui pendidikan tidak bisa ditawar apabila tidak ingin ditinggal. Pendidikan sendiri merupakan sebuah proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda dapat bertahan hidup, dan sejatinya pendidikan sendiri merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan manusia. Membincangkan dampak negatif globalisasi yang berkaitan dengan etika sosial sendiri dapat diselesaikan dengan pendidikan.

Orientasi Pendidikan

Orientasi sebuah pendidikan seperti apa yang sudah saya singgung di atas adalah sebuah proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda dapat bertahan hidup. Melihat hal itu terdapat tiga hal penting yang akan ditransfer melalui pendidikan, yaitu nilai (values), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill). Penekanan terpenting dalam hal ini terletak pada hubungan sesama yang memiliki hubungan erat dengan moralitas sosial.

Sumber : https://retizen.republika.co.id

Pemahaman terkait pendidikan sendiri jika dikaitkan dengan agama Islam sendiri haruslah dibarengi dengan pemahaman terkait universalitas yang harus terus dikembangkan dan diajarkan melalui prakarsa-prakarsa pemikiran yang terbuka, moderat, dan kritis. Dengan demikian pendidikan diharapkan nantinya dapat selalu memberikan sebuah angin segar bagi segala permasalahan kehidupan manusia, karena inti dari sebuah agama sendiri merupakan pemberi rahmat bagi alam semesta.

Orientasi dalam pendidikan harus dilakukan dengan menata sistem pendidikan yang berbasis pada masyarakat, karena pada dasarnya pendidikan sendiri adalah milik dari masyarakat dan untuk masyarakat. Pendidikan sendiri haruslah berorientasi dengan masalah sosial dan lingkungan, karena nilai dari pendidikan sangatlah universal. Dari pada itu, pendidikan sendiri harus diorientasikan untuk membangun pemahaman dan penghayatan moralitas dan etika sosial. Jika melihat kenyataan perilaku sosial masyarakat kita yang beragama Islam tentunya masih banyak persoalan besar, terutama pada aspek moralitas dan etika sosial.

Menyinggung masalah moralitas dan etika sosial tentunya agama Islam sudahlah lengkap dan tidak diragukan lagi, namun banyak nilai-nilai tersebut tidak terwujud. Dengan menyadari kondisi ini, lantas bagaimana memperbaikinya? Jawabannya menurut saya adalah kembali kepada ajaran agama dan menjadikannya sebagai sebuah landasan moralitas atau etika sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Etika Sosial

Etika sosial sendiri diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika sosial sendiri bisa diartikan dengan filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai hamba. Membicarakan kewajiban manusia sebagai hamba, secara sadar semua berpangkal pada hati nurani yang merasa berkewajiban untuk berbuat baik untuk kepentingan manusia di samping kepentingan diri sendiri. Bukan kepentingan sendiri dalam pengertian egois dan merugikan orang lain.

Dalam membangun sebuah etika sosial, agama memiliki posisi sebagai petunjuk, dan sebagai petunjuk agama memberikan pokok-pokok yang akan dijadikan landasan. Dalam penciptaan etika sosial sendiri segala sesuatu yang membahayakan lingkungan sebagai perbuatan yang salah, sudah barang tentu perbuatan ysng jelas-jelas merusak lingkungan itu merupakan suatu perbuatan yang tidak etis. Untuk itu etika sosial dengan segala aspeknya hendaknya kita mensyaratkan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam rangka menciptakan kesejahteraan.

Ajaran agama yang disampaikan melalui pendidikan mengajarkan konsep-konsep mengenai suatu kedudukan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab manusia. Ketika melihat etika sosial sendiri kita harus memahaminya sebagai suatu bentuk peraturan hidup yang berbentuk aturan atau moral yang berasal dari adat istiadat masyarakat. Dan yang lebih penting, penekanan dari suatau ajaran agama yang pada dasarnya adalah hubungan sesama manusia yang sarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas sosial.

Carut Marut Pendidikan di Indonesia (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka)

Oleh: Muhammad Mun'im

Pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur hampir dua tahun ini sangatlah berpengaruh pada semua sektor kehidupan di dunia, terkusus Indonesia. Mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik hingga merambah pada sektor ketertiban di Indonesia. Dalam dunia pendidikan sendiri kita tahu bahwa pemerintah membuat keputusan untuk meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran yang tadinya di sekolah menjadi di rumah. Peralihan pembelajaran ini mamaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring atau non tatap muka. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap sistem pembelajaran yang mulanya dihadapkan dengan guru atau dosen secara langsung berubah menjadi tatap layar. Bahkan tidak jarang kita temukan banyak peserta didik yang acuh tak acuh dengan apa yang dijelaskan pengajar di dalam sebuah forum kegiatan belajar mengajar melalui media online.

Pendidikan di Indonesia

Globalisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pasar telah mengakibatkan pendidikan tidak sepenuhnya dipandang sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi mulai bergeser menuju pendidikan sebagai komoditas. Untuk menangkal model pendidikan sebagai komoditas maka konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara ditawarkan sebagai solusi terhadap distorsi-distorsi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hadjar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Sedangkan pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dewasa ini perguruan tinggi berlomba-lomba untuk menjadi kampus berintegritas tinggi disimbolkan dengan akreditasi A. Fasilitas perkuliahan dibenahi, tembok kelas dicat, pendingin ruangan diperbaiki, administrasi dilengkapi, mahasiswa tingkat akhir diminta segera lulus, dsb. Hingga kadang banyak kelas yang ditinggal dosennya demi untuk mengerjakan syarat administratif sebagai penunjang akreditasi. Hal semacam inilah salah satu hal yang sebenarnya telah mencederai pendidikan di Indonesia. Kurangnya kemampuan tenaga pendidik yang ahli di bidangnya juga merupakan salah satu hal yang dapat menghambat laju pendidikan di negeri tercinta ini. Mulai tingkat dasar hingga tinggi sekalipun. Formalitas

mengalahkan substansi yang sifatnya peningkatan kualitas.

Merdeka Belajar– Kampus Merdeka

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim merespon kondisi pendidikan tinggi di Indonesia dengan meluncurkan Program 'Kampus Merdeka' di Gedung D kantor Kemendikbud, di Senayan, Jakarta, Jumat (24/01/2020). Seperti dilansir oleh *kemdikbud.go.id* yang menjelaskan bahwa mendikbud Nadiem Makarim meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan SDM unggul di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, diperlukan adanya peningkatan kualitas lulusan S1 di Indonesia. Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendukung kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru.

Program pertama yang diusung oleh Nadiem Makarim dalam "Kampus Merdeka" yaitu memberikan otonomi bagi PTN atau PTS untuk membuka program studi baru dengan syarat telah terakreditasi A dan B, serta telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk ke dalam QS Top 100 World universities. Kerjasama yang dilakukan dengan organisasi-organisasi tersebut mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja dan penyerapan lapangan kerja. Selanjutnya Kemendikbud juga akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.

Kebijakan kampus merdeka yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik

peringkat. Nantinya akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT akan tetap berlaku selama 5 tahun dan pengajuan re-akreditasi dapat dilakukan paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (satuan Kerja) untuk menjadi PTN BH (Badan Hukum) tanpa terikat status akreditasi.

Selain itu kebijakan kampus merdeka yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah diluar prodi dan merubah definisi satuan kredit semester (SKS). Kemendikbud menilai saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran diluar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Sehingga diperlukan satu perubahan dalam kebijakan di dalam kampus. Kemudian pengertian sks dari "jam belajar" diubah menjadi "jam kegiatan", artinya sks dapat berupa kegiatan belajar dikelas, magang atau kerja praktek di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar didaerah terpencil dengan syarat mendapat bimbingan langsung dari dosen.

Walaupun sudah diluncurkan, namun banyak juga yang tidak sepakat dengan program yang diluncurkan Mas Menteri. Kebijakan yang menurut Mendikbud Nadiem Makarim dapat "melepaskan belenggu kampus agar lebih mudah bergerak" misalnya, dianggap memperkuat komersialisasi pendidikan. Program ini banyak diragukan di kalangan mahasiswa karena mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan di perguruan tinggi, salah satunya kurikulum.

Berorientasi pada Pasar Bebas

Melansir dari tirto.id, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan kebijakan Nadiem sangat berorientasi pasar bebas, terutama poin ketiga, yaitu mempermudah suatu kampus jadi PTN BH. Ubaid mengatakan PTN BH itu sendiri adalah bentuk komersialisasi pendidikan tinggi yang "mengeksklusi anak-anak dari kalangan tidak mampu." Mempermudah kampus berbadan hukum dianggap sama saja memperluas praktik komersialisasi pendidikan. Pernyataan Ubaid diatas juga selaras dengan tulisan Darmaningtyas dkk dalam buku Melawan Liberalisasi Pendidikan (2013). Di sana dijelaskan PTN BH, yang muncul pertama kali pascareformasi pada dasarnya melepaskan tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan bagi warganya. Kampus yang berstatus PTN BH perlahan dicabut subsidinya oleh negara. Kampus, dengan dalil otonomi non-akademik, diminta mencari uang sendiri untuk biaya operasional. Akhirnya yang paling mudah dilakukan adalah menaikkan biaya kuliah. Pada akhirnya biaya kuliah yang tinggi semakin sulit dijangkau si miskin. Ubaid juga menyebut Nadiem terlalu mengikuti logika industri. Menurutnya ini bertolak belakang dengan fungsi pendidikan tinggi yang seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

MK juga menilai status kampus sebagai badan hukum membuat pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan sama sekali. Badan hukum, misalnya, memungkinkan kampus dipailitkan, dan negara tak memikul tanggung jawab sama sekali jika itu terjadi. Ubaid juga menyebut Nadiem terlalu mengikuti logika industri. Menurutnya ini bertolak

belakang dengan fungsi pendidikan tinggi yang seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

"Soal kebutuhan industri itu memang penting, tapi tri dharma perguruan tinggi harus tetap didahulukan. Jika melulu tunduk pada industri, maka kampus menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari misi kemanusiaan," katanya. Ubaid juga mempermasalahkan mengapa Nadiem seperti mengeluarkan kebijakan sapu jagat untuk seluruh 'kampus konvensional', tapi seolah abai dengan kampus berbasis pendidikan dan praktik, seperti Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan politeknik. Kampus-kampus yang berbasis pendidikan LPTK contohnya seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atau Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang 'melahirkan' guru. "Kebijakan di atas tidak menyinggung problem besar di kampus-kampus LPTK. Output-nya masih bermasalah. Guru-guru dengan kualitas rendah itu, kan, semua lulusan LPTK. Seakan-akan LPTK cuci tangan dengan problem kualitas guru yang rendah ini. LPTK kita harus dievaluasi, mengapa *output*-nya buruk?"
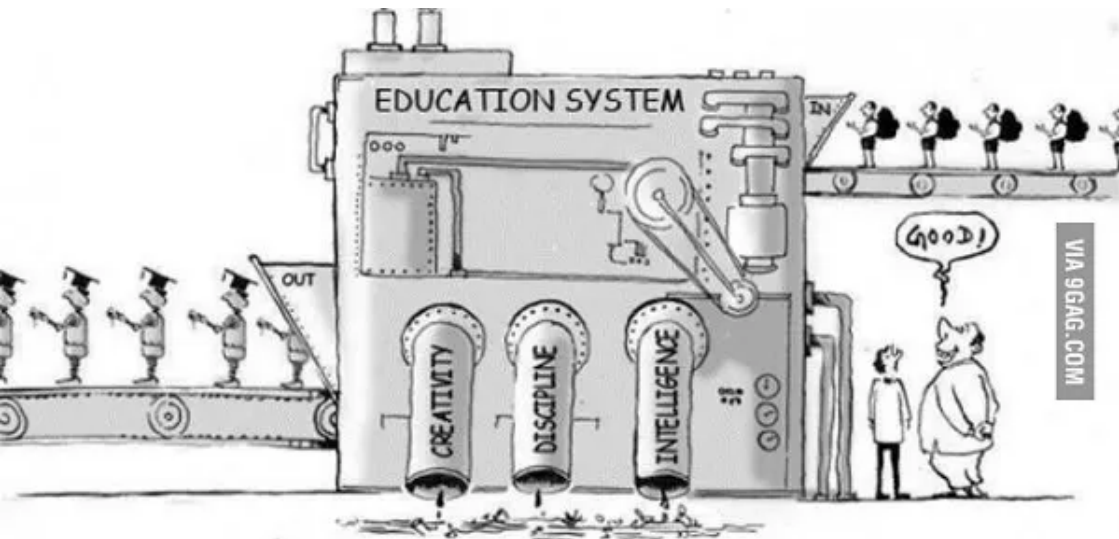
Mekanisme magang yang diperbanyak waktunya juga hanya akan menimbulkan masalah baru. Nadiem mengatakan "perguruan tinggi harus adaptif" yaitu dengan "mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan industry". Harus ada pengaturan yang jelas bagi perusahaan yang membuka pemagangan bagi mahasiswa nantinya. Hal tersebut menandakan adanya kekhawatiran bahwa program magang yang dicanangkan justru malah menjadi alat bagi industri untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Program baru yang memberikan otonomi kepada kampus untuk membuka program baru yang sudah harus bekerja sama dengan organisasi dinilai berdekatan dengan pendekatan pasar, artinya mahasiswa ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Selain itu jam belajar yang diganti menjadi jam kegiatan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk magang selama 2 semester. Padahal magang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, bukan tujuan akademik dan penuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. Kemudian mengenai jangka waktu pemagangan paling lama satu tahun, jika lebih dari satu tahun maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada dinas kabupaten atau kota setempat (Pasal 7 ayat 4 dan ayat 5 Kepmenakertrans No. 22/2009). Orientasi pendidikan semacam ini justru akan membunuh esensi kemerdekaan berpikir kritis sebagai manusia, apalagi sebagai mahasiswa. Pendidikan tidak lagi menjadi alat pembebasan manusia atau memanusiakan manusia.

Pendidikan di Indonesia Selalu Digoyang?

Sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia jika terjadi pergantian menteri maka akan selalu ada kebijakan yang diganti. Setiap

pergantian menteri, kebijakan seperti digoyang. Setiap menteri baru memiliki kecenderungan yang sama untuk mengubah arah kebijakan ketika masa awal jabatannya. Dengan alasan, untuk menyesuaikan arah perkembangan kehidupan yang beragam. Mendikbud menjadi yang paling disorot karena sering kali mengganti kebijakan setiap kali berganti menteri. Pada tahun 2013 misalnya. Pergantian kebijakan sangat signifikan ketika Mendikbud memberlakukan kurikulum 2013 (kurtilas) untuk menggantikan kurikulum 2006 KTSP. Kebijakan tersebut menuai pro-kontra dari agensi pendidikan maupun masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya pun tidak merata. Tidak semua sekolah menerapkan kurtilas. Kurang siapnya SDM dan fasilitas yang memadai menjadi salah satu penyebabnya.

Kemudian ketika Anies Baswedan menduduki kursi mendikbud, kebijakan kurtilas pun ditunda. Anies juga mengubah Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi tolak ukur kelulusan. Keadaan ini mengakibatkan carut-marutnya sistem kurikulum di sekolah. Sebagian sekolah menggunakan KTSP, sedang sebagian lagi menggunakan Kurtilas. Pelaksanaan UN menggunakan dua materi, baik dari kurtilas dan KTSP. Gebrakan ini pun menjadi kebijakan yang digencar oleh Nadiem Makarim, yang telah resmi menghapus UN di semua tingkatan sekolah. Kemudian ada kebijakan Kampus Merdeka yang ramai menjadi buah bibir hingga saat ini.

Akan tetapi, apakah bisa dibenarkan perubahan kebijakan yang selalu berganti-ganti adalah jawaban dari ketertinggalan pendidikan di Indonesia? Dengan kesenjangan pendidikan yang masih tinggi, tenaga pendidik yang kurang mumpuni dan masih banyak masalah pendidikan yang ada. Yang pada tahun ini tingkat pendidikan di Indonesia menempati posisi ke 55 dari 73 negara, di bawah

Singapura, Malaysia dan Thailand. Apakah perubahan-perubahan itu bisa menjadi penyelarasan kebijakan dengan realitas yang ada? Atau itu semua hanya menandakan ketidakmatangan konsep kebijakan? Atau bahkan, "tanam-cabut" kebijakan hanya sebagai ajang unjuk gigi menteri baru agar "dikata bekerja"? Semoga saja bukan begitu. Jika benar-benar menimbang dari latar belakang budaya pendidikan Indonesia yang heterogen, fasilitas, maupun sumber daya yang ada, pergantian kebijakan seharusnya bukan semata karena "ganti menteri ganti kebijakan". Pergantian kebijakan seharusnya memperbaiki kebijakan-kebijakan yang tidak lagi relevan, ataupun sebagai peneyempurna kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dengan keadaan yang terjadi. Prinsipnya adalah *al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*, yakni memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.

Fiqh Kiri: Rekonstruksi Sosial yang Progresif-Humanis

Oleh: M. Taufiqurrahman

Dalam Islam terdapat dua hal yang fundamental, yaitu akidah dan syari'at. Akidah merupakan kepercayaaan yang timbul di hati manusia dan tidak dapat dipaksakan kehadirannya. Sedangkan syari'at merupakan hal yang mengatur tata kehidupan manusia muslim sehari-hari, termasuk di dalam soal ibadah. Fiqh sebagai refleksi syari'at, memiliki empat pokok komponen ajarannya, yaitu *ubudiyah (*peribadatan)*,* muamalah*,* munakahah dan *jinayah.* Fiqh sendiri selalu dijadikan sebagai tolok ukur dalam melihat persoalan-persoalan umat. Hanya saja, para ahli fiqh atau lebih dikenal sebagai *fuqaha*' (organisasi formal *fuqaha'* Indonesia adalah MUI) dalam melihat persoalan umat dalam banyak kasus cenderung memilih persoalan yang tidak menyinggung atau menggoyang kemapanan kekuasaan. MUI misalnya, hanya berkutat pada memberi label halal-haram atau memberi fatwa sesat kepada kelompok yang dianggap menyimpang dari tradisi keagamaan *mainstream*, tetapi enggan mengutuk pabrik-pabrik yang menggaji rendah buruh atau mengutuk (kalau perlu fatwa murtad) terhadap koruptor kelas kakap.

Yang perlu kita pahami di sini fiqh itu berbeda dengan ilmu hukum umum dimana dalam upaya apapun yang dilakukan untuk tujuan pengembangan fiqh menuntut para pengembang memiliki wawasan tentang watak bidimensional-dimensi kesakralan dan keduniawiaan fiqh. Penglihatan serta penempatan kedua dimensi ini harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fiqh benar-benar sejalan dengan watak aslinya. Fiqh tidak menjadi produk liar yang terlepas dari bimbingan wahyu, dan pada saat yang bersamaan fiqh juga tidak menjadi produk pemikian yang kehilangan elastisitasnya. Dengan demikian, faktor teologis maupun etika harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengembangkan fiqh, di samping sudah barang tentu faktor perubahan masyarakat itu sendiri. Lantas jikalau sudah seperti ini bisakah fiqh mampu meng-kiri-kan dirinya? Atau bisakah fiqh berpihak kepada kaum proletar (mustadafin)?

Fiqh Kiri

Kiri berarti meletakkan rakyat tertindas sebagai pihak yang patut dibela, dilindungi dan diperjuangkan. Hasan Hanafi dalam memaknai kiri ialah sebagai pihak yang berada dalam barisan orang-orang yang dikuasai, yang tertindas, dan kaum miskin. Kiri, masih menurut Hanafi, adalah sebuah istilah ilmu politik yang berarti resistensi dan kritisisme dan menjelaskan jarak antara realitas dan idealitas. Jelas, ia adalah istilah akademik yang tanpa dibarengi pretensi politik dalam arti ideologi partai atau mobilitas massa, begitu tegas Hanafi.[1]

---

1 Hassan Hanafi, "Apa Arti Islam Kiri", dalam Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme, (Yogyakarta: LKiS, 2004), cet. VII, hlm. 81-82.

Kata "kiri" dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata "fiqh" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang pengetahuan tersebut diambil dari dalil yang bersifat *tafsiliyyah*. Sehingga, Fiqh Kiri yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntunan *syar'i* yang memihak kepada rakyat yang tertindas, miskin (atau dimiskinkan, *mustad'afin*), atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan hegemonik yang despotik. Fiqh Kiri diposisikan sebagai antitesis terhadap fiqh *mainstream* yang selama ini cenderung memihak kepada atau dipakai untuk mengamankan kekuasaan.

Fiqh sendiri dalam agama Islam menempati suatu posisi kunci sebagai produk pemikiran ulama yang mencoba melakukan interpretasi atas normativitas teks/nash dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan zaman. Dalam khasanah fiqh klasik dikenal berbagai macam aliran fiqh yang mencerminkan kecenderungan para fuqaha' dalam melakukan ijtihad (intellectual exercise). Kecenderungan itu sendiri dipengaruhi oleh ragam pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam melakukan ijtihad. Ada aliran fiqh yang cenderung liberal, karena memberi porsi lebih besar kepada akal untuk terlibat dalam proses ijtihad, ada aliran yang cenderung literal karena berusaha menempatkan teks sebagai faktor dominan dalam proses ijtihad.

Banyak sekali aliran fiqh pada era klasik lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat atau umat saat itu ketimbang sekedar adu argumen berbasis metodologi tertentu yang tidak memiliki nilai praksis apa pun. Imam Hanafi lebih liberal dalam berijtihad, karena ia dihadapkan pada dinamika Bashrah yang tinggi, sementara

perbendaharaan teks (Qur'an dan Hadis) jumlahnya terbatas. Inilah kondisi yang memberi peluang kepada Imam Hanafi untuk lebih kreatif dalam memainkan eksperimen intelektualnya.

Tetapi, dari sekian corak dan ragam pemikiran fiqh yang muncul pada zamannya, pemikiran mengenai itu mencerminkan bentuk solusi konkret dalam penyelesaian problem masyarakat yang nantinya bisa dijadikan sebagai pedoman. Inilah yang dimaksud oleh Hassan Hanafi dengan nilai praksis pemikiran keagamaan,[2] sebuah segmen yang sering diabaikan oleh para pemikir, dimana para pemikir lebih senang bergulat dengan wacana yang terkadang tidak memiliki bobot implementasi di lapangan.

Wacana akan adanya Fiqh Kiri atau fiqhnya kaum tertindas sewarna dengan wacana Islam Kiri yang sudah digagas luas oleh Hassan Hanafi maupun beberapa pemikir lain yang menempatkan Islam sebagai kekuatan kritik sosial dan revolusi. Fiqh Kiri pun harus diarahkan kepada bentuk pemikiran fiqh yang mempunyai keberpihakan yang jelas kepada pihak yang teraniaya dan tertindas. Fiqh Kiri di sini harus mampu memberi panduan kepada umat untuk dapat memformulasikan bentuk-bentuk perlawanan kepada kezaliman sebagai manifestasi perjuangan menegakkan keadilan dan kemaslahatan di muka bumi.

Fiqh Kiri, memiliki asumsi bahwa fiqh adalah *al-ahkam al-amaliyyah* (hukum perilaku) yang bertanggungjawab atas pernik-pernik perilaku manusia agar selalu berjalan dalam koridor kebajikan dan tidak mengganggu pihak lain, sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Dalam kapasitas ini, kebenaran fiqh diukur oleh

---

2 Hasan Hanafi, Islamologi I: dari Teologi Statis ke Anarkis, Miftah Faqih (pertj.), (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 160-177.

relevansinya dalam membawa masyarakat ke arah yang lebih makmur, dinamis, adil, dan beradab *(maslahah).* Fiqh Kiri dalam konteks ini berseberangan dengan fiqh yang selama ini diasumsikan sebagai sesuatu yang statis untuk mendukung stabilitas dalam masyarakat. Lagi-lagi, ini adalah sebagai akibat dari bias kepentingan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan maupun pengetahuannya. Fiqh yang diposisikan sebagai medium harmoni macam ini, akan terjebak pada arus yang tidak seirama dengan kepentingan rakyat banyak.

Fiqh Kiri di sini mempunyai orientasi serta misi pembebasan, sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam progresif. Pembebasan dan Fiqh Kiri bermakna melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan sosial yang penuh penyimpangan dan ketidakadilan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul dahulu. Masing-masing Nabi dan Rasul mendapat tugas risalah yang muaranya adalah pembebasan manusia dari belenggu kezaliman dan tirani.

Proyek Strategis Revolusi Sosial

Para ahli usul (usuliyyun) menyebut kesadaran praksis dari sebuah proses intellectual exercise (ijtihad) sebagai “buah”. Proses ijtihad itu sendiri, dalam epistemologi interpretasi Hassan Hanafi melewati tiga tahap kerja hermeneutis: Pertama, penguatan kesadaran historis, yaitu setelah melakukan uji otentisitas terhadap nash. Kedua penguatan kesadaran eidetis dalam bentuk validitas pemahaman dan interpretasi hermeneutik, dan ketiga, kesadaran praksis datang terakhir untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan hukum, signifikansi perintah-perintah dan larangan-larangan, dan transformasi wahyu dari ide normatif ke gerakan sejarah.

Sumber : https://interaktif.tempo.co

Bagi Hanafi sendiri praksis merupakan penyempurnaan kalam Tuhan di dunia, mengingat tidak adanya sebuah kebenaran teoritis dari sebuah dogma atau kepercayaan yang datang begitu saja, dogma lebih merupakan suatu gagasan atau motivasi yang ditujukan untuk praksis.[3] Hal ini karena wahyu al-Qur'an sebagai dasar dogma merupakan motivasi bagi tindakan di samping sebagai objek pengetahuan.

Fiqh Kiri harus mengambil perhatian utama bahwa suburnya ketidakadilan di muka bumi ini bukan semata-mata karena kondisi internal, tetapi yang jauh lebih menentukan justru faktor eksternal yang seringkali memunculkan menjadi pihak hegemonik despotik, baik di lingkup nasional maupun internasional. Bukan saja Fiqh Kiri ingin memuaskan rakyat yang dahaga akan adanya rasa keadilan, melainkan juga menjadi sebuah jalan bagi permintaan tanggungjawab negara yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya.

3 Hassan Hanafi, Dialog Agama dan Revolusi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 22.

Justru kehadiran Fiqh Kiri sendiri menjadi relevan bukan saja pada rezim yang represif, melainkan pada rezim yang menggantungkan posisinya di tiang gantungan badan-badan Internasional. Namun, untuk menjelma menjadi gerakan yang meluas dan mendapat dukungan, Fiqh Kiri patut untuk merintis beberapa praktek yang akan mendekatkannya pada tujuan utama, terciptanya tatanan keadilan. Di sinilah pentingnya untuk merumuskan agenda revolusi sosial sebagai bagian dari praksime Fiqh Kiri.

Penutup

Fiqh Kiri merupakan sebuah alternatif atas kebekuan atau kejumudan ajaran Islam dewasa ini, yang telah dikungkung oleh bentuk-bentuk pemikiran korservatif yang selalu mempertahankan sesuatu yang sudah mapan. Fiqh Kiri merupakan sebuah bentuk progresivisme pemikiran Islam yang ingin mengembalikan misi ajaran Islam pada otentisitasnya, yaitu semangat pembebasan. Membebaskan umat dari bentuk-bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan yang telah membuat umat menjadi sengsara dengan kemiskinanya dan keterbelakangannya.

Pada akhirnya, semua pemikiran ini berpulang kepada kesungguhan serta tekad para ulama, cendekiawan, dan umat Islam secara keseluruhan untuk mewujudkan Fiqh Kiri ini menjadi kekuatan dalam melakukan sebuah agenda besar yaitu revolusi sosial. Sebuah revolusi yang dimaksudkan di sini merupakan sebuah upaya merekonstruksi tatanan sosial masyarakat sehingga lebih memungkinkan tumbuh kembangnya nilai-nilai kemaslahatan dalam masyarakat. Sehingga masyarakat yang adil, makmur, tanpa penindasan, dapat diwujudkan.

"Ilmu dan Bakti Kuberikan, Adil dan Makmur Kuperjuangkan."

Salam Pergerakan!

Daftar Referensi

Hassan Hanafi, "Apa Arti Islam Kiri", dalam Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme, (Yogyakarta: LKiS, 2004), cet. VII.

Hasan Hanafi, Islamologi I: dari Teologi Statis ke Anarkis, Miftah Faqih (pertj.), (Yogyakarta: LKiS, 2003).

Hassan Hanafi, Dialog Agama dan Revolusi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).

Kontruksi Dialektik dan Tradisi Kritis Pemikiran Islam

Oleh: Majida Nuur

Ilmu pengetahuan merupakan bagian integral dalam terminologi Islam, pemikiran Islam seperti teologi, filsafat, dan tasawuf merupakan sebuah hasil dari pergulatan pemikiran para pemikir Islam dengan berbagai macam hal. Watak kritis sendiri sejatinya menjadi ruh dalam budaya Islam, sehingga penggalian ilmu terus dilakukan untuk mencapai kebenaran, serta sebagai aplikasi dari fungsi akal yang diciptakan oleh Allah untuk berfikir.

Pentingnya sebuah ilmu pengetahuan sendiri dalam Islam tersebar dalam istilah-istilah seperti *tholabul ilmi faridhotun*. Banyak sekali ragam pemikiran dalam Islam sendiri, bahkan sifatnya saling mengkritisi dan itu sudah dimulai sejak zaman Nabi. Fenomena pemikiran tersebut merupakan bentuk kebenaran subjektif dari hasil daya tangkap manusia dari ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah yang objektif. Meilhat ini tentunya diperlukan adanya sebuah pemahaman yang sanggup melakukan interpretasi kritis terhadap suatu pemikiran orang lain dalam memahami realitas yang disajikan

tuhan untuk secara maksimal dieksplorasi.

Dengan demikian produk-produk pemikiran intelektual muslim adalah sesuatu yang sifatnya nisbi, dan setiap topik pemikiran merupakan wilayah diskusi dan kritik. Orientasi keilmuan adalah sebuah senjata ampuh yang mampu menggiring kaum muslim sebagai kiblat akan ilmu pengetahuan. Dalam Islam sendiri tidak ada klaim akan sebuah kebenaran ataupun pemutlakan akan sebuah pemikiran, bahkan dalam Islam sendiri terdapat banyak sekali kalimat *ikhtilaf bayna al-ulama,* ini membuktikan tidak adanya otoritas mutlak dalam pendidikan Islam.

Sumber : http://watchfoodienetwork.yolasite.com

Term kritis sendiri adalah suatu proses berfikir yang reflektif yang berfokus untuk menemukan apa yang diyakininya untuk diperbuat. Dengan sikap kritis suatu kebenaran akan digugat hingga nantinya memnuculkan adanya sebuah tesis, antithesis, serta sintesis yang terus berputar dinamis dengan orientasi progresif.

Pengetahuan sendiri dalam kacamata Islam tidaklah hanya

menunjuk pada suatu sudut khusus dari mana kaum muslim bisa memadang ilmu, akan tetapi memberikan sebuah penekanan pada suatu keharusan yang mendesak untuk mencari ilmu, seperti apa yang diperintahkan Allah kepada Muhammad pertama kali, yaitu *iqra'* yang memiliki arti 'bacalah'. Kata bacalah ini sendiri memiliki arti yang luar biasa sebagai proses dalam pencarian ilmu.

Islam dalam konsepsi kritisnya adalah sebuah pembacaan baru terhadap agama terdahulunya serta kemudian memberikan sebuah penilaian terhadapnya dan berakhir dengan merekonstrusksi serta meralat orientasinya. Ini berdasar, setiap yang baru pasti memiliki dasar lama, dan setiap dasar yang lama dikembangkan ke dalam yang baru. Sikap seperti inilah yang dilakukan oleh al-Qur'an, yakni melakukan sebuah pembacaan ulang terhadap tradisi arab sebelumnya. Dengan begitu, pembacaan masa kini terhadap masa lalu menjadikan sebuah pengalaman dinamis sebagai dasar bagi pemahaman terhadap suatu teks sejarah, dan pembacaan masa lalu terhadap masa kini akan menyingkapkan faktor-faktor pembentuk masa kini.

Daya kritis sendiri merupakan sebuah pertanda keberadaan serta aktualisasi akan hidup manusia. Dari daya kritisnya itulah manusia memiliki sebuah kemampuan untuk menyadari diri hingga selanjunya mampu menerobos dan melampaui batas-batas eksistensinya. Dengan begitu tidak ada yang perlu ditakutkan untuk melakukan sebuah dekontruksi nalar karena hal ini sejatinya adalah sebuah upaya untuk mejadikan Islam sebagai suatu agama yang cocok di setiap zamannya. Dan yang perlu diingat semangat kritis harus terlebih dahulu dihidupkan sebagai suatu langkah awal untuk memulai segalanya.

Tujuan Pendidikan, Kepentingan Pragmatis atau Pemahaman Kritis?

Oleh: Nur Rahman

Semua sudah mafhum bahwa pendidikan hari ini diharapkan masyarakat sebagai sebuah pembelajaran untuk membangun karakter bangsa, dapat menjadikan manusia yang berkarakter progresif, egaliter dan demokratis. Pendidikan bukanlah lahan untuk kepentingan pribadi ataupun merenggut keuntungan finansial dari mereka yang ingin berpendidikan, melainkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang menindas dan mana yang ditindas.

Lembaga pendidikan saat ini tidak lagi menjadi sebuah nilai instrumen memanusiakan manusia. Dilihat dari apa yang terjadi sekarang ini, banyak kampus dan sekolah yang memberlakukan biaya yang tinggi. Mustahil menemukan biaya pendidikan yang dapat dijangkau oleh mereka dari kalangan menengah ke bawah, bahkan bisa dikatakan mereka yang tidak melanjutkan pendidikan adalah mereka yang tidak mempunyai uang.

Kampus saat ini hanyalah bertujuan untuk perkembangan kampus itu sendiri bukan bertujuan untuk berkembangnya mahasiswa yang belajar di situ, birokrasi kampus hanya memikirkan bagaimana kampus bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya. Tidak berbeda jauh dari apa yang kita ketahui tentang sistem pasar, sama-sama mencari keuntungan dengan apa yang dihasilkan, bedanya sistem pasar mereka menjual produk atau sembako sedangkan kampus menjual tenaga pengajar (Dosen), matakuliah (SKS) dan kemewahan fasilitas yang bisa kita sebut berlebihan. Mereka layaknya korporasi yang hanya memikirkan profit, maka tak heran biaya pendidikan di Indonesia kian hari kian melonjak.

Secara historis, pendidikan di Indonesia pada zaman era Soeharto mulai muncul bibit-bibit kapitalisme dan pragmatisme, yang mana pada saat itu pembangunan adalah panglimanya, pertumbuhan ekonomi dikejar terus-terusan tanpa mempedulikan aspek kemanusiaan, Aspek-aspek penting lainnya rela ditinggalkan demi pertumbuhan ekonomi.

Munculnya pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang hanya dipersiapkan untuk menjadi pekerja dari para kaum kapitalis, dengan dalih pembelajaran yang terpusat dan konsentrasi pendidikan, mereka dapat merubah pandangan umum tujuan dari pendidikan sebagai bentuk pengembangan karakter bangsa hingga ke pendidikan untuk kerja. Kehadiran SMK ini yang mereka harapkan dapat meluluskan peserta didik yang siap pakai dan sesuai dengan bidang kerja pembangunan kaum kapitalis.

Sekolah menengah kejuruan menjadi pilihan bagi orang tua yang menginginkan anaknya dapat langsung bekerja di bidang yang mereka inginkan.Dari apa yang terjadi saat ini mereka yang semula

belajar di SMK dan kemudian lulus, mereka hanyalah bagian dari apa yang kapitalis harapkan yaitu bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, bentuk pola pikir seperti ini yang membawa malapetaka besar bagi masa depan manusia yang menyebabkan pendidikan terjerumus dalam pragmatismenya.

Dalam realitas keadaan pendidikan pragmatis yang seperti ini, kepekaan manusia dapat hilang terhadap kebobrokan bangsanya. Mereka yang pragmatis dalam pola pikirnya akan tunduk terhadap permainan elite global dunia, sifat pragmatis hanya akan mencetak generasi yang ingin cepat mendapatkan gelar sarjana dan memperoleh profesi yang bergengsi. Banyak kejadian ketidakadilan dalam penguasaan pemerintahan, jika manusia hanya berpikiran pragmatis tanpa ada perlawanan dari kebijakan itu sendiri maka tunggulah kehancuran bangsanya.

Sumber : https://www.zarukjhi.my.id

Menurut Marx, pendidikan bertujun untuk menciptakan kesadaran kritis, bukan pengetahuan dan keterampilan teknis yang mendukung proyek kapitalisme. Dari apa yang digagaskan Marx tentang tujuan pendidikan tersebut sangatlah mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. orientasi pelajar di Indonesia menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan kerja bergengsi ataupun profesi, menjadi tokoh masyarakat dan bahkan hanya untuk mengangkat status sosialnya. Indonesia selama ini hanya terbelenggu dalam sistem pendidikan kapitalisme global, kebanyakan dari masyarakat hanya dapat mengikuti kebijakan sistem pendidikan apa yang diturunkan oleh pemerintah tanpa ada kritikan atau bahkan perlawanan dalam kebijakan itu. Hal ini dampak dari pendidkan pragmatis yang telah ditentukan oleh kapital yang kemudian turun menjadi regulasi kebijakan pendidikan pemerintah.

Pendidikan kapitalisme yang selama ini menjadi ideologi sistem pendidikan internasional yang terus digagaskan dalam sitem pendidikan di Indonesia ini juga menjadi hambatan dalam berkembangnya Indonesia. Sistem ini tidak dapat membebaskan bangsa dari belenggu kebodohannya, bahkan menempatkan manusia tidak dengan esensi martabat manusia sejatinya. Jangan biarkan pendidikan dikuasai oleh kaum elit kapital hingga kaum miskin yang ingin melanjutkan pendidikan terhalang oleh biaya dan jangan biarkan adanya pendidikan hanya untuk menjadi pekerja, jadikanlah pendidikan sebagaimana semestinya.

Demokrasi Liberal dan Alasan Dibalik Golput

Oleh: Rusda Khoiruz

"Lah kenapa kamu tidak nyoblos, Mas? Itu kan kewajiban kamu sebagai warga negara. Harusnya sebelum berangkat ke sini, kamu nyoblos dulu di TPS! Udah diberi demokrasi begini kok golput sih, Mas?"

Sambil cengengesan, saya mendengarkan dengan khidmat nasihat ini dari pak RT yang kebetulan sedang *jagongan* bersama bapak-bapak di warung kopi yang saya kunjungi pada pagi menjelang siang di hari Pemilu dan Pilpres 2019 lalu digelar. Tak berhenti di situ, dari sisi lain saya turut mendengar ada orang yang menimpali dengan nada meninggi, "Wah payah sampean, Mas. Maumu itu bagaimana (kok tidak nyoblos)?" Kontan, tatapan seluruh hadirin warung kopi itu mengintimidasi saya seorang diri. Saya tamatkan satu-satu tangan mereka memang ada bekas cap warna ungu pertanda telah mencoblos.

Saya bisa memaklumi pandangan orang-orang yang begitu sinis kepada insan yang memilih golput sebagai jalan ninjanya menjadi warga negara macam saya ini. Maklum, saya yakin, sebab mereka mengartikan demokrasi sebatas urusan coblos mencoblos calon pemimpin setiap lima tahun sekali di bilik kotak suara saat Pemilu tiba.

Konsep demokrasi yang hanya berkutat pada persoalan pemilu ini, yang tampaknya juga banyak diamini oleh masyarakat Indonesia, persis seperti yang oleh Walter Lippman katakan tentang demokrasi liberal. Lippman sendiri adalah seorang pemuka wartawan Amerika, dia juga kritis terhadap kebijakan dalam dan luar negeri, serta seorang teoritis demokrasi liberal yang terkenal. Dalam salah satu esainya, ada sub judul yang berbunyi “Sebuah Teori Progresif Tentang Pemikiran Demokrasi Liberal”.

Cukup menarik membaca gagasan Lippman di situ tentang “rekayasa persetujuan”, yaitu mengadakan persetujuan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak publik. Itulah yang saat ini kita kenal dengan Pemilu.

Sebelum jauh ke situ. Pertama-tama Lippman membagi masyarakat demokrasi ke dalam dua kelas. Pertama, kelas masyarakat yang memegang peran aktif dalam menjalankan hubungan-hubungan publik. Merekalah para ahli dan elit, yang berpikir, menganalisis, melaksanakan, mengambil keputusan dan menjalankan segala hal di bidang politik, ekonomi, dan sistem ideologi. Mereka adalah minoritas.

Kedua, ialah kelas mayoritas dari populasi penduduk suatu negara. Lippman menasbihkan kelas yang kedua ini dengan sebutan

"kawanan pandir". Merekalah buruh, rakyat biasa, petani, mahasiswa, orang-orang di warkop itu dan lain-lain.

Singkatnya, kelas yang pertama ialah para penguasa yang memegang peran eksekutif dalam menjalankan kepentingan bersama. Sedangkan kelas kedua, mereka cuman berperan sebagai "pemirsa", bukan "pemain" dalam pekerjaan para elit tadi.

Nah, karena kita berada di alam demokrasi, maka sekali-kali "kawanan pandir" ini juga diizinkan untuk memberikan dukungan, atau dalam istilah Lippman, "meminjamkan kekuatan(politik)-nya" kepada salah satu anggota kelas para ahli atau elit. Itulah yang saat ini kita kenal dengan Pemilu, yang juga digunakan sebagai medium untuk menjinakkan kawanan pandir agar seolah mereka benar-benar di dalam alam demokratis. Dan ini juga yang disebut dengan "rekayasa persetujuan" seperti yang sudah saya singgung di muka.

Selain saat Pemilu, kawanan pandir tidak mempunyai daya tawar apapun untuk mengatur urusannya sendiri. Bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka benar-benar menjalani peran sebagai "pemirsa".

Kawanan pandir tidak boleh dibiarkan bebas berorganisasi, karena dengan begitu mereka bisa menjadi lebih dari sekedar pemirsa. Sudah benar mereka dibiarkan ngopi saja, tak lebih. Sebab sangat mungkin bagi mereka menjadi "pemain" tatkala berbagai kalangan dengan sumber daya yang terbatas dapat berkumpul lalu memasuki arena politik. Dan ini sangat mengkhawatirkan bagi para kelas ahli dan tuannya (Chomsky, 2019: 8-9).

Lantas, jika kawanan pandir berperan hanya sebagai pemirsa saja dan eksistensinya hanya dibutuhkan setiap lima tahun sekali

untuk digiring datang ke TPS, maka untuk siapa kelas para elit dan ahli yang dipilih kawanan pandir itu mengabdi? Tentu, jawabannya adalah, melayani orang-orang yang memiliki kekuatan nyata yang jumlahnya sangat sedikit. Merekalah para pengusaha, pebisnis, dan pemegang modal. Baik swasta maupun BUMN.

Bagi Lippman, yang tampaknya juga kita aminkan, demokrasi dapat dikatakan berjalan dengan baik manakala dua kelas tersebut menjalankan perannya masing-masing. Inilah yang dinamakan demokrasi liberal.

Propaganda Menjinakkan Kawanan Pandir

Namun betapapun begitu, kawanan pandir ini tidak pernah benar-benar dapat dijinakkan. Berbagai upaya pun dilakukan oleh kelas elit, ahli, serta empunya. Salah satunya dengan menggulirkan teknik propaganda. Cara ini mereka gunakan pada tahun 1935 ketika kaum buruh di Amerika, untuk pertama kalinya, meraih kemenangan legislatif yang sangat berarti, yakni diberlakukannya hak untuk berorganisasi yang disebut Wagner Act.

Kalangan pebisnis ingin memastikan bahwa inilah kemenangan legislatif terakhir kaum buruh, sekaligus awal dari berakhirnya "penyimpangan demokrasi" oleh organisasi rakyat. Dan usaha propaganda itu berhasil bukan lewat begundal atau kekerasan.

Melainkan dengan cara mencari jalan supaya publik berbalik memusuhi para pemogok. Memperlihatkan bahwa mereka pengacau, perusak fasilitas publik dan berlawanan dengan kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu tentu kepentingan pribadi kita, kalangan pebisnis, para ahli dan istri-istrinya yang tinggal di rumah. "Lihatlah para pemogok jahat itu, mereka itu pengacau, "biang kerok",

merusak harmoni dan melanggar norma sosial," begitu kira-kira.

Faktor lain yang membuat usaha ini berhasil ialah kontrol kuat kalangan pebisnis atas media. Mereka memiliki sumber daya yang luar biasa banyaknya dari segi material. Selanjutnya usaha ini dikenal dengan sebutan formula Mohawk Valley dan diterapkan berulang kali untuk menghancurkan aksi pemogokan dan gerakan rakyat (Chomsky, 2019: 16).

Kalau kita tarik dalam konteks Indonesia, merentang sejak tahun 45 hingga sekarang, yang terbaru adalah demo September 2019 lalu, demo UU Cilaka dan daftar ini masih bisa saya panjangkan, teknik propaganda ini juga sering digunakan untuk menghancurkan gerakan akar rumput. Kunci utama dari teknik propaganda sejatinya cukup sederhana. Jangan biarkan rakyat memikirkan dan mempertanyakan isu yang sesungguhnya. Misal, kesenjangan material antara si kaya dan si miskin, kebijakan yang menindas, atau otoritarianisme dsb.

Ciptakan sebuah slogan yang tak seorang pun berani berseberangan dengannya, dan semua orang sudi mendukungnya. Seperti, "Demi keamanan dan ketertiban demo harus dibubarkan", "NKRI harga mati jangan biarkan Papua merdeka!", "Demi kebaikan bangsa dan negara maka memilih pemimpin adalah *fardhu 'ain"*, dan seterusnya. Tak ada yang tahu apa makna di baliknya, karena memang tidak bermakna apa-apa. Yang penting, slogan itu mampu mengalihkan perhatian rakyat dari pertanyaan yang benar-benar bermakna.

Sementara itu, berbagai gelombang pemberontakan kawanan pandir seperti pada tahun 1930 saat terjadi *deep depression*, kemudian 1960, atau di Indonesia pada 1998 yang sedang menggulirkan

reformasi. Oleh kelas ahli dan elit kondisi ini dinamakan "krisis demokrasi". Demokrasi dianggap sedang memasuki krisis.

Krisis yang dimaksud adalah ketika sejumlah besar rakyat terorganisir dan aktif, serta mencoba untuk berpartisipasi di arena politik. Konsep ini jelas bertentangan dengan definisi demokrasi di kamus-kamus dan buku-buku. Menurut definisi kamus, keadaan seperti iti adalah sebuah "kemajuan demokrasi". Sedangkan kelas para elit dan ahli memelintirnya.

Dengan demikian, kelas elit dan ahli sukses memunculkan kesan bahwa keadaan ini merupakan masalah, dan krisis ini harus segera diatasi entah bagaimanapun caranya. Rakyat harus segera digiring kembali ke keadaan apatis, patuh, dan pasif di depan layar TV dan *gadget* mereka masing-masing. Mereka hanya boleh aktif bersuara (kampanye dan memberikan dukungan pada kelas elit dan ahli) lima tahun sekali saja, yaitu saat Pemilu tiba.

Anda tentu tidak asing dengan jargon "pesta demokrasi" yang muncul tiap lima tahunan itu, bukan? Saya pribadi, sudah jenuh dengan jargon ini. Jargon ini hanya jadi kedok untuk menutupi praktik bagi-bagi selebaran uang warna biru atau merah serta transaksi politik kelas elit dan ahli dengan para pebisnis, pemodal, dan investor asing. Oleh karenanya, Pemilu, hanya sekedar jadi medium peremajaan kelas elit dan ahli, tapi tidak dengan demokrasi sejati. Selama Indonesia masih menjalankan sistem demokrasi liberal, selama itu pula saya akan memutuskan untuk golput saja, Pak RT!

COME AND VISIT US AT OUR WEBSITE
WWW.PMIIRASYA.COM

"Tujuan Pendidikan Itu Untuk Mempertajam Kecerdasan, Memperkukuh Kemauan Serta Memperhalus Perasaan"

- Tan Malaka